



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

**BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal...

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan lampiran Perda ini terdiri dari :

- Bab I PENDAHULUAN
- Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- Bab IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005–2025
- Bab V ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005–2025
- Bab VI PENUTUP

Pasal 6

Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Juni 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUKOSRONO, SH.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 – 2025**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJP Daerah ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintahan, sehingga Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005–2010, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2011–2015, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2016–2020, dan RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2021–2025.

RPJP Daerah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Perda tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005. Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005 wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni dari sisi substansi dan jangka waktunya.

Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah, pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 34

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 – 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Maksud dan Tujuan I-2

1.3. Landasan Hukum I-2

1.4. Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya I-3

1.5. Sistematika Penulisan I-4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Geomorfologi II-1

2.1.2. Lingkungan Hidup II-4

2.1.3. Demografi II-5

2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam II-8

2.1.5. Sosial Budaya dan Politik..... II-14

2.1.6. Prasarana dan Sarana II-22

2.1.7. Pemerintahan..... II-24

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi II-26

2.2.2. Lingkungan Hidup II-26

2.2.3. Demografi II-27

2.2.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam II-29

2.2.5. Sosial Budaya dan Politik..... II-29

2.2.6. Prasarana dan Sarana II-30

2.2.7. Pemerintahan..... II-30

2.3. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan II-31

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS..... III-1

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

3.1.1 Perkembangan lingkungan global III-1

3.1.2 Perkembangan lingkungan regional III-1

3.1.3 Perkembangan lingkungan nasional III-2

3.2 Peluang dan Kendala

3.2.1 Peluang III-3

3.2.2 Kendala..... III-4

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025 IV-1

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025.....IV-1

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJPD.....IV-7

**BAB V ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.....V-1**

5.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.....V-1

5.2 Tahapan dan Skala PrioritasV-16

5.2.1. RPJM ke-1(2005-2010)V-16

5.2.2. RPJM ke-2 (2011-2015)V-17

5.2.3. RPJM ke-3 (2016-2020)V-19

5.2.4. RPJM ke-4 (2021-2025)V-20

BAB VI PENUTUPVI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penyebaran dan Luas Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-1
Tabel 2.2.	Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-2
Tabel 2.3.	Luas Wilayah Fisiografis di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-2
Tabel 2.4.	Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah	II-3
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 Di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-5
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003	II-6
Tabel 2.7.	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2003.....	II-7
Tabel 2.8.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah	II-8
Tabel 2.9.	Indeks Kemiskinan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah	II-16
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 – 2004.....	II-17
Tabel 2.11	Jumlah, Pertambahan Dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009	II-27
Tabel 2.12	Proyeksi Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah 2010-2015, 2020 dan 2025.....	II-27
Tabel 5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2008	V-20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-15
Grafik 2.2	Perkembangan Indeks Kemiskinan Manusia di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	II-17
Grafik 5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2004 – 2009.....	V-18
Grafik 5.2	Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000 – 2009.....	V-19
Grafik 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalteng dan Nasional, Februari 2007 – Agustus 2009.....	V-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah semakin memampukan dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan terhadap kualitas hidup di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah pun telah berubah, meningkat dari kondisi sebelumnya.

Walaupun kualitas manusia telah meningkat, tetapi masih banyak masalah-masalah pembangunan yang masih harus direspon secara cepat dan tepat, seperti pembukaan keterisolasian wilayah, pemanfaatan lahan gambut, peningkatan kualitas program-program pengentasan kemiskinan, serta masalah-masalah pembangunan lainnya.

Perubahan dan perbaikan yang telah terjadi juga menimbulkan tantangan baru. Tantangan pembangunan ini bersumber dari masalah-masalah pembangunan yang belum terselesaikan, tuntutan baru akibat perubahan peluang dan ancaman yang bersumber dari faktor-faktor eksternal, maupun dampak negatif dari aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak terduga dan tidak diantisipasi.

Beberapa tantangan baru tersebut adalah: pengembangan keberdayaan masyarakat untuk pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bagian dari strategi baru dalam percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dunia usaha, ancaman kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, pembangunan modal sosial (*social capital*) pasca kerusakan dan optimalisasi modal sosial (*social capital*) sebagai sumberdaya pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan dasar yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah seluruh Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan kesadaran hukum, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perubahan pola penularan penyakit, dan tantangan-tantangan pembangunan lainnya.

Permasalahan pembangunan yang masih tersisa serta tantangan baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan respon yang relevan dari semua pelaku pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dan konsistensi program kegiatan antar pelaku harus ditingkatkan. Program dan kegiatan fasilitasi pembangunan dari pemerintah daerah harus saling menguatkan satu sama lain. Tumpang tindih dan bahkan kejadian program yang saling meniadakan program lainnya harus dikurangi sehingga seluruh sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, konsistensi program dan kegiatan fasilitasi pembangunan harus pula diperhatikan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus konsisten secara

vertikal, konsisten secara horizontal, dan konsisten dengan isu strategis yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, semangat dan motivasi semua pelaku harus pula ditingkatkan agar upaya-upaya penciptaan dan peningkatan nilai tambah ekonomi tidak melambat, tetapi bergerak cepat sesuai peluang dan ancaman pembangunan yang muncul dari luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sinkronisasi kebijakan memerlukan kesamaan persepsi tentang masa depan yang akan dituju. Pemahaman bersama tentang masa depan ini akan menjadi pengarah dan pemberi inspirasi tiap tindakan dan pengendali tiap kepentingan para pelaku pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian diperlukan dokumen perencanaan jangka panjang yang lebih konsisten secara vertikal dan horizontal, konsisten dengan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta konsisten dengan arahan perundang-undangan sebagai dasar untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 45 di wilayah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi, serta saling memperkuat satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Idiil dari RPJP Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945. Adapun landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan, mulai dari tahun 2005 hingga 2025.

RPJP Daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang merupakan rencana pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan. RPJM Daerah tersebut memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan RPJPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi kondisi umum dan prediksi yang menjabarkan lebih lanjut tentang kondisi geomorfologi, lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, serta pemerintahan.

Bab III Analisis Isu-isu Strategis, menguraikan tentang analisis lingkungan strategis global, regional dan nasional serta peluang dan kendala pembangunan daerah.

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 berisi visi dan misi pembangunan daerah tahun 2005-2025, serta tujuan dan sasaran RPJPD

Bab V Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 memuat tentang arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, serta tahapan dan skala prioritas.

Bab VI Penutup menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka keberhasilan visi dan misi pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Geomorfologi

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564 km², secara astronomis terletak pada posisi 111° – 115° Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara – 3°30' Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai laut Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0 – 50 m di atas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan antara 0% - 8%.

TABEL 2.1. PENYEBARAN DAN LUAS WILAYAH DARATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Kelas Ketinggian (dpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0 – 7	2.105.510	13,69
2.	7 – 25	2.269.717	14,76
3.	25 – 100	6.398.923	41,66
4.	100 – 500	3.327.459	21,63
5.	> 500	1.278.391	8,31

Sumber : Bappeda Provinsi Kalteng, Pengembangan KSP Provinsi Kalteng Tahun 2000.

Sementara itu, wilayah daratan dan perbukitan berada pada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian utara dan barat daya dengan ketinggian 50 – 100 dpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25%.

TABEL 2.2. LUAS MASING-MASING KELAS KEMIRINGAN WILAYAH DARATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase luas (%)
1.	0 – 2	4.955.715	32,22
2.	2 – 15	4.449.227	28,93
3.	15 – 40	4.413.385	28,73
4.	> 40	1.556.672	10,12

Sumber : Bappeda Provinsi Kalteng, Pengembangan KSP Provinsi Kalteng Tahun 2000

Sedangkan secara fisiografis, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 wilayah yang didominasi oleh dataran rendah, pesisir, undak-undak pedalaman, dataran dan perbukitan pedalaman Pegunungan Schwaner, Pegunungan Muller dan Pegunungan Meratus, dimana secara lebih lengkap diuraikan pada tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3. LUAS WILAYAH FISIOGRAFIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Wilayah	Luas (km ²)
1.	Dataran rendah	36.870
2.	Pesisir	37.310
3.	Undak- undak pedalaman	57.124
4.	Dataran dan perbukitan pedalaman Pegunungan Schwaner	9.000
5.	Pegunungan Muller	11.000
6.	Pegunungan Meratus	2.300

Sumber : Bappeda Provinsi Kalteng, Pengembangan KSP Provinsi Kalteng Tahun 2000

Berdasarkan kerangka tektonik regional Kalimantan, daerah provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam cekungan Barito yang terletak di sisi tenggara lempeng mikro sunda. Bagian utara dipisahkan dengan cekungan Kutai oleh “*Paternoster Fault System*” atau “*Barito-Kutai Cross High*”. Sebelah timur dipisahkan dengan cekungan asem-asem dan cekungan pasir oleh pegunungan Meratus. Di sebelah selatan merupakan batas tidak tegas dengan cekungan Jawa Timur dan di sebelah barat oleh tinggian Sunda. Pembagian stratigrafi cekungan Barito dari tua ke muda adalah sebagai berikut:

- Batuan Dasar Pra-Tersier, terdiri dari batuan metasedimen dan batuan beku.
- Formasi Tanjung, bagian bawah didominasi oleh batuan pasir dan kongmerat dengan interkalasi batubara, bagian tengah selang-seling batu pasir, batu lanau dan batu lempung serta bagian atas terdiri dari batu lempung gampingan dengan interkalasi batu gamping dan batu bara.

- Formasi Montalat, terdiri dari batu pasir kuarsa, agak padat, sisipan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Berau, bagian bawah terdiri dari selang-seling batu gamping dengan napal, bagian tengah berupa bagian batu gamping masif berupa kerangka dari suatu terumbu dan pada bagian bawah terdiri dari selang-seling batu gamping dengan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Warukin, bagian bawah selang-seling antara batu pasir dengan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Dohor, terdiri dari batu pasir, batu lanau dengan interkalasi batu lempung dan batu bara serta fragmen batuan yang lebih tua.

Sebagian besar wilayah daratan Kalimantan Tengah terdiri dari jenis tanah podsolik merah kuning. Pada dasarnya jenis tanah di Kalimantan Tengah terdiri dari: organosol, laterit, regosol, alluvial, podsol, lithosol dan latosol.

TABEL 2.4. LUAS MASING-MASING JENIS TANAH DI WILAYAH DARATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Podsolik Merah Kuning	6.033.693	39,60
2.	Orgnosol	2.534.766	11,63
3.	Laterit	2.118.460	13,90
4.	Regosol	1.452.305	9,53
5.	Alluvial	1.423.803	9,34
6.	Podsol	1.040.452	6,51
7.	Lithosol	413.793	2,71
8.	Latosol	269.360	1,77

Sumber : Bappeda Provinsi Kalteng, Pengembangan KSP Provinsi Kalteng Tahun 2000.

Sedangkan karakteristik iklim Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- Tipe iklim : Tropis lembab dan panas
- Klasifikasi koppen : Afa
- Suhu udara : rata-rata 29⁰ C maksimum 33⁰ C
- Curah hujan rata-rata tahunan : 2.732 mm dengan rata-rata hari hujan 120 hari.
- Klasifikasi curah hujan Schmidt dan Ferguson : Tipe – A (Q=14,3%) dan Tipe – B (Q=33,3%), makin ke utara curah hujan semakin tinggi.

2.1.2. Lingkungan Hidup

Sejauh ini, pengelolaan hutan dapat dikatakan belum efektif, hal ini ditandai dengan masih terjadinya eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa diimbangi dengan reboisasi yang memadai, disamping maraknya *illegal logging* yang saat ini cenderung menjadi sumber mata pencaharian utama dari penduduk sekitar hutan.

Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun, banjir besar yang melanda beberapa daerah kabupaten di Kalimantan Tengah beberapa tahun belakangan dan ancaman *elnino* merupakan eksese dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan eksploitasi dan rehabilitasi hutan.

Keberadaan sumber daya pertambangan berupa logam mulia dan emas di daerah aliran sungai (DAS) Kahayan di satu sisi memberi berkah ekonomi bagi kehidupan masyarakat, namun pada sisi lain pengelolaan sumber daya alam ini yang menggunakan bahan berbahaya tidak ramah lingkungan. Akibatnya kerusakan lingkungan berupa musnahnya sumber daya hayati dan bencana geologi merupakan ancaman yang selalu membayangi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan Kalimantan Tengah.

Keberadaan perairan sungai dan laut di Kalimantan Tengah menjadikan wilayah ini cukup kaya dengan keragaman sumber daya perikanan. Namun demikian seringkali masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan ini. Penggunaan bahan beracun, bahan peledak dinamit dan bahan berbahaya sejenisnya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan secara umum.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai semenjak tahun 2001 lalu secara tidak langsung telah mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan. Akibatnya kebijakan kehutanan cenderung parsial untuk suatu tujuan yang sempit dan kurang memperhatikan dampak makro kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

Terjadinya penebangan liar, *illegal logging*, penambangan tanpa ijin dan berbagai bentuk pelanggaran eksploitasi SDA lainnya tidak lepas dari kepentingan ekonomi komunitas yang tinggal di lokasi SDA tersebut. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran disamping kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi ekologis dari lingkungan menjadi penyebab terjadinya eksploitasi yang berlebihan.

Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pilihan kebijakan untuk pengembangan kualitas dan kelestarian lingkungan adalah pengalihan peran dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan menjadi pihak yang berdaya dan efektif

dalam pengendalian tindakan-tindakan yang berpotensi untuk mencemari dan merusak kelestarian lingkungan. Selain melalui pengalihan peran tersebut, upaya-upaya pengembangan daya dukung dan kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, program dan kegiatan dari berbagai unsur yang terkoordinasi antar perangkat daerah serta antar daerah harus terkoordinir dengan baik sehingga program dan kegiatan tersebut saling melengkapi dan tidak saling meniadakan.

2.1.3. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 berjumlah 1.870.707 jiwa dengan perbandingan 48,42% perempuan dan 51,58% laki-laki. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Kapuas berjumlah 328.480 jiwa dan jumlah penduduk terendah di kabupaten Sukamara berjumlah 33.417 jiwa. Jumlah rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 tercatat 436.628 rumah tangga. Jumlah rumah tangga tertinggi terdapat di Kabupaten Kapuas berjumlah 77.889 rumah tangga dan jumlah rumah tangga terendah, yakni kabupaten Sukamara berjumlah 7.479 rumah tangga. Jumlah penduduk, rumah tangga dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota tahun 2003 di Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan pada tabel 2.5.

TABEL 2.5 JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1. Kotawaringin Barat	48.402	99.928	88.566	188.494	113
2. Kotawaringin Timur	64.560	150.928	136.232	287.160	111
3. Kapuas	77.889	166.055	163.425	329.480	102
4. Barito Selatan	27.837	58.588	56.843	115.431	103
5. Barito Utara	25.037	56.823	54.159	110.982	105
6. Sukamara	7.479	17.548	15.869	33.417	111
7. Lamandau	12.645	25.761	22.728	48.489	113
8. Seruyan	23.171	54.753	48.191	102.944	114
9. Katingan	29.601	65.384	59.665	125.049	110
10. Pulang Pisau	27.557	56.525	56.909	113.434	99
11. Gunung Mas	16.240	42.713	40.482	83.195	106
12. Barito Timur	18.906	39.342	38.335	77.678	103
13. Murung Raya	19.899	45.374	41.131	86.505	110
14. Palangka Raya	37.405	85.132	83.317	168.449	102
Jumlah/Total 2003	436.628	964.855	905.852	1.870.707	107
2002	454.977	939.365	895.000	1.834.365	105
2001	460.365	925.275	876.432	1.801.707	106

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2000	468.049	938.316	885.399	1.823.715	106
1999	400.515	898.886	863.185	1.762.071	104

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2003.

Perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tergolong tidak padat yaitu 12,18 jiwa/ km². Bila diamati menurut Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan kepadatan penduduk yang cukup berarti, dimana Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi merupakan kota dengan kepadatan paling tinggi, yakni 70,19 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Murung Raya merupakan Kabupaten dengan kepadatan paling rendah yaitu 3,65 jiwa/km².

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan perkotaan, seperti pemukiman kumuh, persampahan, kebersihan lingkungan, serta permasalahan-permasalahan lain yang cenderung terjadi di wilayah perkotaan yang padat, masih relatif belum menonjol. Namun demikian, masalah kepadatan ini tetap perlu diantisipasi melalui peningkatan jumlah pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan keterkaitan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

TABEL 2.6. JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2003

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kotawaringin Barat	10.759	7,01%	188.494	17,52
2	Kotawaringin Timur	16.496	10,74%	287.160	17,41
3	Kapuas	14.999	9,77%	329.480	21,97
4	Barito Selatan	8.830	5,75%	115.431	13,07
5	Barito Utara	8.300	5,40%	110.982	13,37
6	Sukamara	3.827	2,49%	33.417	8,73
7	Lamandau	6.414	4,18%	48.489	7,56
8	Seruyan	16.404	10,68%	102.944	6,28
9	Katingan	17.800	11,59%	125.049	7,03
10	Pulang Pisau	8.997	5,86%	113.434	12,61
11	Gunung Mas	10.804	7,04%	83.195	7,70
12	Barito Timur	3.834	2,50%	77.677	20,26
13	Murung Raya	23.700	15,43%	86.505	3,65

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
14	Palangka Raya	2.400	1,56%	168.449	70,19
	Jumlah	153.564	100%	1.870.706	12,18

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003

Dari data pada tabel 2.6 di atas mengindikasikan bahwa lapangan usaha perlu difasilitasi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat penyerapan angkatan kerja yang relatif tinggi, maka lapangan usaha terutama di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan diharapkan akan meningkat pula. Produktivitas lapangan usaha ini perlu ditingkatkan karena jumlah angkatan kerja yang ada didalamnya relatif cukup besar. Selanjutnya, bila pemasaran produk ini dapat ditingkatkan, maka daya serap sektor pertanian ini terhadap angkatan kerja akan lebih optimal dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Sebagian besar (61,11%) penduduk berumur 10 tahun ke atas (produktif secara ekonomis) bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor keuangan yaitu sebesar 0,51%.

TABEL 2.7. PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA TAHUN 2003

No.	Lapangan Usaha Utama	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase Angkatan Kerja (%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan	491.291	61,11
2	Pertambangan dan Penggalian	23.653	2,94
3	Industri Pengolahan	47.185	5,87
4	Listrik, Gas dan Air	713	0,09
5	Bangunan	19.401	2,41
6	Perdagangan, Besar, Eceran, Rumah Makan, hotel	106.316	13,22
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	36.108	4,49
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan	4.112	0,51
9	Jasa Kemasyarakatan	75.210	9,35
JUMLAH		803.989	100,00

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003

Pada Tabel 2.8 disajikan jumlah dan pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1999–2003.

TABEL 2.8. JUMLAH, PERTAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 1999-2003

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1999	1.762.071	-	-
2000	1.823.715	61.644	3,38
2001	1.801.707	-22.008	-1,22
2002	1.834.365	32.658	1,78
2003	1.870.707	36.342	1,94

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003

2.1.4 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

2.1.4.1 . Kondisi Bidang Administrasi Penanaman Modal

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan potensial, seperti hutan yang sangat luas dan lebat, yang perlu dimanfaatkan dan dipelihara untuk pembangunan hutan yang berkelanjutan; struktur tanah yang sangat cocok untuk perkebunan sawit, karet, nilam dan tanaman yang sejenis; memiliki hasil pertambangan seperti batubara, emas, pasir besi dan lainnya.

Namun demikian tingkat pemanfaatan (utilisasi) atas potensi ini masih relatif rendah. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas penanaman modal masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Permasalahan yang mengemuka dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal ini adalah minimnya ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Hal mendasar lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan administrasi penanaman modal. Di dalam pelayanan ini termasuk upaya-upaya untuk promosi potensi dan peluang usaha di wilayah Kalimantan Tengah.

2.1.4.2 Kondisi Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah masih tinggi, yaitu sebesar 43,1%. Besarnya kontribusi sektor ini diikuti juga oleh besarnya penyerapan terhadap tenaga kerja dan besarnya sumbangan devisa, sehingga sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memegang peran penting dalam sosial budaya masyarakat di Kalimantan Tengah.

Produksi padi pada tahun 2003 sebesar 490.080 ton, mengalami kenaikan 24% dibanding dengan tahun 2002. Peningkatan ini disebabkan antara lain karena adanya perluasan areal tanam (PAT) dan penertiban penebangan hutan liar, sehingga masyarakat banyak yang kembali bekerja sebagai petani tanaman pangan.

Pada sub sektor perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta, dan perkebunan rakyat cenderung meningkat. Sedangkan pada sub sektor kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kalimantan Tengah, tercermin dari semakin berkurangnya atau menurunnya hasil produksi kayu bulat dan kayu olahan pada setiap tahunnya. Pada sub sektor peternakan, urutan populasi tertinggi pada tahun 2004 adalah: ayam buras (5.563.246 ekor), berturut-turut diikuti oleh ayam ras pedaging (2.187.599 ekor), Babi (241.877 ekor), Itik (193.110 ekor), sapi potong (55.599 ekor), kambing (37.398 ekor), ayam ras petelur (29.587 ekor), kerbau (14.864 ekor) dan terakhir domba (4.210 ekor). Sedangkan jika ditilik dari kenaikan populasinya, pada tahun 2004 adalah: ayam buras (17,97%), ayam ras pedaging (12,86%), ayam ras petelur (12,79%), itik (12,67%), kerbau (11,24%), babi (9,53%), sapi potong (9,09%), kambing (4,20%) dan domba (0,77%). Sedangkan hasil produksi pada jenis perikanan, produksi perikanan laut lebih besar jika dibandingkan dengan produksi perikanan darat.

Dalam jangka panjang, pengelolaan sektor pertanian yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri merupakan jawaban atas kemenangan persaingan dalam skala nasional maupun internasional. Pada sisi lain, kemampuan dalam menjaga ekosistem merupakan tantangan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena dengan adanya keseimbangan ekosistem yang baik maka kelestarian alam akan terjaga.

2.1.4.3 Kondisi Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Bertambahnya jumlah, jenis dan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi, khususnya yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam upaya percepatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Percepatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan menjadi berkelanjutan saat kemitraan usaha, baik kemitraan antar usaha dalam satu daerah maupun kemitraan usaha antar daerah dapat ditingkatkan. Dalam kondisi seperti ini, pondasi perekonomian provinsi Kalimantan Tengah akan semakin kuat.

Hingga saat ini akselerasi perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan Tengah masih relatif rendah. Data BPS tahun 2002 menunjukkan bahwa jumlah industri skala besar dan sedang di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 72 buah. Angka ini sangat kecil di bandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Kalimantan. Di tahun 2002, data BPS menunjukkan bahwa jumlah industri dalam skala besar dan sedang yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 162 buah. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, jumlah industri skala besar dan sedang yang telah berdiri masing-masing sebesar 137 dan 133 buah.

Data dan informasi lebih detail tentang usaha kecil di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah yang dihasilkan oleh Bank Indonesia yang melaksanakan kegiatan *Baseline Economic Survey (BLS)* melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK).

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 1996, jumlah usaha kecil di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 185.200 unit usaha, dengan perkembangan rata-rata pertahun unit usaha kecil sejak tahun 1986 sebesar 13,56%.

Penyebaran unit usaha kecil terkonsentrasi pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas (34%) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (28,67%), sedangkan persentase untuk Kota Palangka Raya hanya 3,86%. Berdasarkan sektor usaha, penyebaran unit usaha kecil tetap terkonsentrasi pada sektor pertanian, dengan persentase penyebaran mencapai 63,75%, diikuti sektor perdagangan/hotel/restoran 18,44%, dan penyebaran terkecil pada sektor lembaga keuangan (0,13%). Perkembangan rata-rata pertahun untuk penyebaran unit usaha kecil sejak tahun 1986 menurut sektor berkisar antara 4,02% (pertanian) hingga konstruksi/bangunan (22,63%), sementara menurut

wilayahnya relatif merata dengan kisaran antara 11,36% di Kota Palangka Raya hingga 15,68% di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Unit usaha kecil merupakan unit kegiatan yang menyerap tenaga kerja yang besar, baik tenaga kerja keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga. Data Sensus Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1996 menunjukkan sebanyak 699.248 orang terserap dalam kegiatan usaha kecil pada 8 sektor usaha. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 1986 terjadi penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 311.990 orang dengan perkembangan rata-rata 12,92% pertahun.

Sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (49%) dari total tenaga kerja se-Provinsi Kalimantan Tengah, diikuti perdagangan/hotel/restoran (19,75%) dan industri pengolahan (7,63%), sedangkan sektor lembaga keuangan memiliki persentase terkecil (0,57%). Berdasarkan wilayahnya penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil terkonsentrasi pada Kabupaten Kapuas (34,1) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (25,82%), sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 5,15% (Kota Palangka Raya) hingga 12,57% (Kabupaten Kotawaringin Barat).

Isu strategis utama yang dihadapi dalam rangka percepatan perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah:

1. Masih relatif rendahnya semangat (jiwa) kewirausahawanan masyarakat, khususnya pada angkatan kerja muda yang belum dapat diserap oleh pasar tenaga kerja,
2. Lemahnya kemitraan dan efektivitas jaringan usaha untuk penguatan keterkaitan (*forward* dan *backward linkages*) antar usaha dan antar daerah di wilayah Kalimantan Tengah,
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat serta koperasi dan UKM terhadap bahan baku, modal, teknologi dan akses terhadap pasar,
4. Masih belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pendukung dinamika dunia usaha,
5. Belum berkembangnya jasa konsultasi pengembangan usaha kecil dan menengah,
6. Rendahnya insentif bagi pengembangan usaha, terutama bila pemerintah daerah masih fokus pada upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Rendahnya semangat (jiwa) kewirausahawanan masyarakat disebabkan oleh karena masih lemahnya keterkaitan sistem pendidikan formal dengan upaya pengembangan semangat (jiwa) dan

ketrampilan kewirausahawanan (jalur pendidikan formal tidak berorientasi untuk menghasilkan calon pengusaha yang berkualitas), orientasi angkatan kerja yang masih cenderung memilih sebagai karyawan dari usaha dan lembaga yang sudah eksis, serta belum tersedianya informasi tentang peluang dan pilihan usaha yang lengkap, khususnya yang fokus untuk diseminasi informasi tentang ragam pilihan usaha menurut tingkat pengembalian dan kemudahan pengelolaannya.

Faktor penyebab lain yang juga cukup berpengaruh pada semangat (jiwa) kewirausahawanan masyarakat adalah karena struktur perekonomian di wilayah Kalimantan Tengah yang masih bersifat agraris dan keterkaitan antar struktur perekonomiannya (*backward and forward linkages*) masih rendah, sehingga pilihan usaha yang tersedia masih relatif terbatas. Pilihan usaha *off farm* yang umumnya tersedia di wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian adalah perdagangan kebutuhan pokok dan perdagangan sarana produksi. Permasalahan transformasi struktural perekonomian ini cenderung membutuhkan upaya besar bersifat jangka panjang.

Selain faktor kewirausahawanan, faktor lain yang mempengaruhi akselerasi perkembangan UKM dan Koperasi adalah faktor aksesibilitas, yaitu akses terhadap bahan baku, akses terhadap modal usaha, akses terhadap teknologi, serta akses terhadap pasar.

Dengan asumsi bahwa proses produksi di usaha kecil dan menengah masih relatif sederhana, maka masalah aksesibilitas yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap modal kerja dan akses terhadap pasar. Rendahnya akses terhadap modal kerja terutama disebabkan oleh sistem perbankan yang cenderung fokus pada pengumpulan dana masyarakat, sedangkan penyalurannya pada sektor riil masih relatif rendah dan hanya fokus pada usaha-usaha yang lebih *bankable* di wilayah perkotaan.

Namun demikian melihat perkembangan bank perkreditan rakyat serta pelaksanaan proyek-proyek yang berorientasi pada penyaluran kredit bergulir di wilayah-wilayah kelurahan/desa dan perkotaan, maka masalah rendahnya aksesibilitas usaha ini dapat dikurangi.

Bila lembaga-lembaga penyedia pinjaman bergulir ini dapat dioptimalkan, maka dalam jangka pendek dan jangka menengah ini upaya untuk memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha untuk meningkatkan akses usaha kecil dan menengah terhadap pasar akan menjadi penting artinya.

Hal lain yang perlu diupayakan adalah peningkatan stabilitas perekonomian. Untuk tingkatan kewenangan pemerintah daerah, peningkatan stabilitas lebih fokus pada peningkatan stabilitas ketersediaan sembilan bahan pokok, keterpercayaan para pihak pada tiap transaksi ekonomi, meningkatkan keberfungsian pasar, serta stabilitas ketersediaan input produksi serta barang-barang strategis.

Menjaga kestabilan ketersediaan sembilan bahan pokok harus menjadi prioritas di setiap waktu. Terkendali dan stabilnya ketersediaan sembilan bahan pokok ini akan mengurangi kerentanan masyarakat luas, yang juga berarti terjaganya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk peningkatan stabilitas ini para pihak yang terlibat secara langsung adalah perangkat daerah yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan, bidang usaha kecil, menengah dan koperasi, serta Badan Urusan Logistik. Idealnya, seluruh pihak tersebut saling mendukung dan memperkuat satu sama lain baik secara horizontal maupun vertikal (antar perangkat daerah dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah).

2.1.4.4 Kondisi Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah penduduk yang relatif cukup tinggi, antara tahun 1999 hingga tahun 2003 sebesar 1,52%, tentu saja akan sangat berpengaruh pada perkembangan jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja, dan tingkat pengangguran. Masalah pengangguran ini penting karena berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi akan menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial jika dikelola dengan baik, tetapi akan menjadi permasalahan yang sangat besar atau hambatan pembangunan jika jumlah penduduk atau tenaga kerja tersebut tidak dikelola dengan baik.

Pada tahun 2005 penduduk Kalimantan Tengah diperkirakan berjumlah 1,98 juta orang, dengan rasio berdasarkan jenis kelamin adalah 48% perempuan dan 52% laki-laki. Sedangkan sebarannya per kilometer persegi dapat dikategorikan rendah atau jarang, yaitu hanya sekitar 12 orang per km². Penduduk dengan usia produktif secara ekonomis sebesar 77%, yang didominasi angkatan kerja usia 25 tahun sampai dengan 29 tahun yaitu sebesar 61%. Penyerapan tertinggi terhadap tenaga kerja adalah pada sektor pertanian, sedangkan terendah pada sektor keuangan sebesar 2%. Data BPS menunjukkan

bahwa pada tahun 2004, tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 5,59%.

Tingkat pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja didominasi baru berpendidikan SD sebesar 40,3%, setelah itu berturut-turut diikuti oleh lulusan SMP 21,0%, lulusan SMU 14,4%, tidak lulus SD 12,8%. Sedangkan lulusan Perguruan tinggi hanya sebesar 4,3% saja, sedikit lebih tinggi dengan yang tidak pernah sekolah sebesar 3,9%. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk yang telah bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Ketersediaan data atau informasi ketenagakerjaan, antara lain meliputi: informasi kesempatan kerja dan lowongan kerja pada semua sektor di perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah (BUMD/BUMN), serta data pengangguran dan pencari kerja yang akurat dan *up to date*.

Pada sisi lain, pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan (tenaga kerja di perusahaan) tetap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Isu-isu mengenai pengupahan, pengembangan pembinaan dan hubungan industrial selalu perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

2.1.5 Sosial Budaya dan Politik

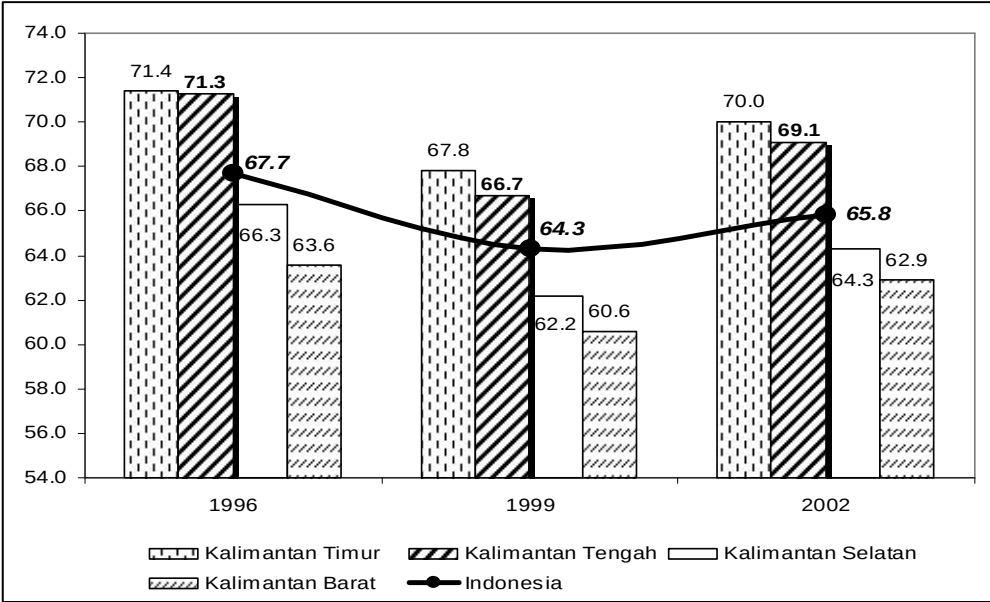
Taraf kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah meningkat dari kondisi pada masa yang lalu. Perkembangan taraf hidup tersebut dapat dilihat dari perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang ditunjukkan pada Grafik 2.1. Secara umum, tingkat pembangunan manusia di Kalimantan Tengah berada di atas rata-rata nasional, baik pada tahun 1996, 1999 maupun tahun 2002 yang ditunjukkan dengan lebih tingginya angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan rata-rata IPM seluruh provinsi di Indonesia.

Di tahun 1996, angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah 71,3 sedangkan IPM Indonesia adalah sebesar 67,7. Di tahun 1999, angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 66,7, lebih rendah dari kondisi di tahun 1996, tetapi masih lebih tinggi dari IPM Indonesia, yang di tahun 1999 sebesar 64,3. Selanjutnya di tahun 2002, angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 69,1 yang tetap lebih tinggi dari angka IPM Indonesia yang sebesar 65,8.

Grafik 2.1. juga menggambarkan perkembangan IPM provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pada grafik tersebut terlihat bahwa IPM Provinsi Kalimantan Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah,

tetapi sudah relatif lebih baik dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Berdasarkan perbandingan IPM antar provinsi yang ada di Pulau Kalimantan ini dapat disimpulkan bahwa dinamika para pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih relatif belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

GRAFIK 2.1 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sumber: BPS, Bappenas, UNDP, 2001 dan 2004

Pemahaman yang lebih jauh tentang kinerja pembangunan manusia di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Index*). Data pada tabel dan grafik di bawah ini memberikan informasi nilai indeks kemiskinan manusia seluruh provinsi di pulau Kalimantan.

Berdasarkan data indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Index*) terlihat bahwa sejak tahun 1995 hingga tahun 2002 kondisi kemiskinan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung tetap pada kisaran angka 29,0 dan 33,1. Angka HPI Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dari angka rerata nasional, yang berarti bahwa kemiskinan manusia di Kalimantan Tengah masih lebih tinggi.

TABEL 2.9 INDEKS KEMISKINAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI	INDEKS KEMISKINAN MANUSIA (HUMAN POVERTY INDEX = HPI)			
	1995	1998	1999	2002
Kalimantan Barat	36,0	38,7	38,7	38,0
Kalimantan Tengah	33,1	29,0	29,0	30,7
Kalimantan Selatan	26,5	24,4	24,4	25,5
Kalimantan Timur	19,9	20,6	20,6	19,1
Indonesia	25,2	25,2	25,2	22,7

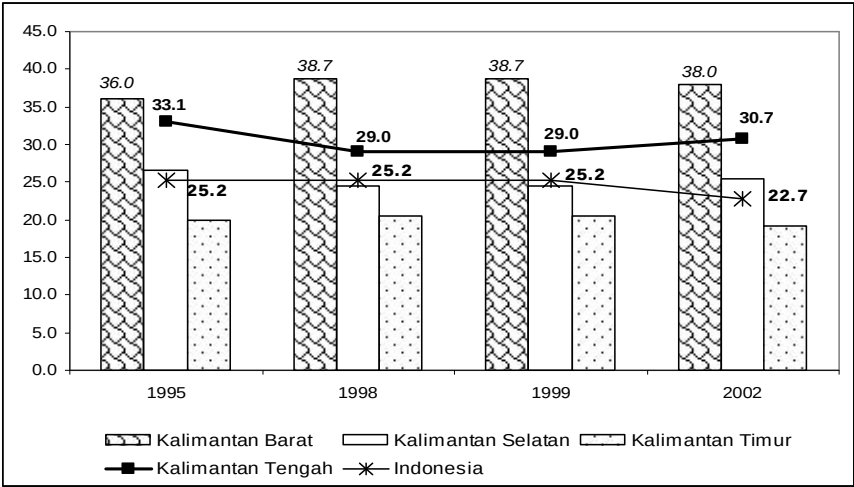
Sumber : BPS, Bappenas, UNDP, 2001 dan 2004
Keterangan : Semakin besar nilai HPI, semakin besar pula derajat kemiskinan manusianya.

Bila dibandingkan dengan kondisi provinsi lain yang ada di pulau Kalimantan, data tabel di atas dan grafik di bawah menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan terendah ketiga setelah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Namun demikian, angka indeks kemiskinan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi dari pada angka indeks kemiskinan manusia provinsi Kalimantan Tengah, yang berarti kondisi kemiskinan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih rendah dari pada kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan data HDI dan HPI ini, maka agenda pembangunan yang mendesak harus dilaksanakan untuk percepatan pembangunan manusia adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita,
2. Peningkatan tingkat harapan hidup,
3. Peningkatan tingkat melek huruf (pemberantasan buta huruf),
4. Peningkatan akses penduduk terhadap air bersih dan sehat,
5. Peningkatan akses penduduk, khususnya penduduk yang sedang sakit, terhadap fasilitas kesehatan, serta
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan kepengasuhan balita.

GRAFIK 2.2 PERKEMBANGAN INDEKS KEMISKINAN MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sumber : BPS, Bappenas, UNDP, 2001 dan 2004

Gambaran perkembangan HDI dan HPI Provinsi Kalimantan Tengah di atas telah memberikan gambaran umum tentang kinerja pembangunan manusia. Gambaran jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.11.

TABEL 2.10 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2002 – 2004

No	Uraian	Tahun		
		2002	2003	2004
1	Jumlah Penduduk	1.834.365	1.870.707	1.919.664
2	Jumlah Penduduk miskin	662.940	520.992	671.498
	Prosentase Penduduk Miskin	36,14%	27,85%	34,98%

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2005

Dari sisi jumlah penduduk miskin, di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2002 – 2004 mengalami perubahan yang berfluktuatif. Dari tabel 2.11 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 berjumlah 662.747 jiwa atau sebesar 36,14 persen, kemudian pada tahun 2003 mengalami penurunan yang berjumlah 520.992 jiwa atau sebesar 27,85 persen. Namun pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan berjumlah 671.498 jiwa atau sebesar 34,98 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah bisa disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi di sub sektor kehutanan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.5.1 Kondisi Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah merupakan hak dasar rakyat, yang didalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 disebut hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sudah relatif lebih baik dari kondisi sebelumnya. Namun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Data survey Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa angka kematian bayi di Kalimantan Tengah sudah relatif menurun, namun masih terdapat 32 kematian bayi per 100.000 kelahiran. Angka kematian ibu melahirkan di Kalimantan Tengah sebesar 373 per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup di Kalimantan Tengah sudah relatif membaik, yaitu 71,98 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang bernilai sebesar 69,51 tahun. Selanjutnya, prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita mengalami penurunan dari 6,1 persen (2000) menjadi 1,9 persen (2004).

Gambaran umum tentang kondisi kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi.

Faktor utama penyebab permasalahan ini adalah masih lemahnya kinerja pelayanan kesehatan. Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus tuberkulosis paru. Pada tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 85 persen, sedangkan proporsi penemuan kasus penderita tuberkulosis paru pada tahun 2002 baru mencapai 80,83 persen.

Selain faktor penyebab di atas, permasalahan tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi juga disebabkan faktor masih belum terbudayakannya pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA). Pada tahun 2004, persentase bayi usia 4-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif baru mencapai 70 persen. Persentase gizi kurang pada anak balita 6,1 persen (2000) menurun mencapai 1,9 persen (2004). Penderita AIDS pada tahun 2004 tercatat sebanyak 2 orang.

2. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.

Angka kematian bayi pada masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan pada masyarakat yang relatif lebih sejahtera. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit malaria, diare dan TB Paru. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin dan sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau sebagian penduduk, yang sebagian besar diantaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu.

Selain itu, masalah disparitas status kesehatan juga memerlukan perhatian yang lebih serius. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada masyarakat miskin hampir empat kali lebih tinggi dari masyarakat yang relatif lebih sejahtera. Selain itu,

angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada masyarakat miskin lebih rendah dibandingkan masyarakat yang relatif lebih sejahtera.

3. Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.

Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Terjadinya beban ganda yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia lanjut, akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang.

Selain hal-hal yang disebut di atas, masalah lainnya adalah rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 53 persen, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 70 persen. Kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas-sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.

2.1.5.2 Kondisi Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial

Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas. Informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah kurang mencerminkan kondisi riil, hal ini disebabkan oleh minimnya data dan informasi mengenai kondisi bangunan dan alat-alat penunjang sekolah. Secara umum permasalahan dalam

penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, manajemen sekolah, aplikasi kurikulum berbasis kompetensi yang belum optimal, peningkatan keberdayaan komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan, peran orang tua murid dalam peningkatan kualitas budaya belajar siswa. Semua permasalahan di atas harus dituntaskan untuk meningkatkan tingkat melek huruf, peningkatan kapasitas kepribadian siswa, peningkatan kemampuan akademis, daya kreasi dan inovasi siswa.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian izin usaha bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan nonformal yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan tertentu. Idealnya, bidang ketrampilan yang disediakan lebih berorientasi pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan Tengah serta memasukkan unsur pengembangan budaya belajar dan pengembangan pendidikan tentang ketrampilan hidup.

2.1.5.3 Kondisi Bidang Penanggulangan Masalah Sosial

Penyandang masalah sosial dapat diartikan dengan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, hambatan dalam menjalankan hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial). Sejauh ini berbagai bentuk PMKS yang ada di Kalimantan Tengah meliputi; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan dan keterasingan serta kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Data BPS menunjukkan bahwa hingga tahun 2004 ini, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 34,98%, urutan ketiga terbesar di pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Proses globalisasi yang sangat deras terjadi saat ini semakin mempermudah pergerakan orang, barang dan informasi tanpa dibatasi oleh batas negara dan wilayah. Ekses globalisasi berupa penggunaan narkoba, kenakalan remaja dan berbagai perilaku anti sosial lainnya merupakan tantangan-tantangan yang semenjak dini harus diantisipasi dengan penguatan sistem sosial kemasyarakatan.

Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali beberapa tahun belakangan ini cenderung akan mengakibatkan dampak lingkungan berupa terjadinya bencana alam banjir, kebakaran hutan dan *el nino*. Antisipasi sosial terhadap akibat

bencana alam kedepan harus menjadi perhatian dan melembaga dalam agenda kegiatan berbagai pihak di Kalimantan Tengah.

Sejauh ini permasalahan kesejahteraan sosial dalam masyarakat cenderung hanya dibebankan pada individu ataupun pemerintah. Inisiatif dan prakarsa masyarakat untuk ikut serta menangani permasalahan ini cenderung masih kurang serta belum melembaga dalam bentuk kemitraan yang berkelanjutan. Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini juga masih kurang memfasilitasi pelembagaan kemitraan dan partisipasi nilai-nilai sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat Kalimantan Tengah seperti Huma betang, isen mulang, kesetiakawanan sosial, kerukunan sosial, dan lain-lain merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada. Selanjutnya pelembagaan berbagai nilai luhur tersebut dalam penanganan permasalahan sosial harus menjadi salah satu fokus kebijakan berbagai tingkatan pemerintah daerah.

2.1.6 Prasarana dan Sarana

2.1.6.1 Kondisi Bidang Sarana dan Prasarana Umum

Ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan syarat dasar dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi para pengusaha keberadaan sarana dan prasarana ini akan menurunkan komponen biayanya sehingga daya saing produknya dapat dinaikkan. Bagi masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana ini juga sangat penting dalam menurunkan biaya hidup dan peningkatan kenyamanan hidupnya (*amenity*). Keberadaan sarana dan prasarana ini juga sangat penting dalam percepatan peningkatan pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Adanya pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi juga menuntut ketersediaan atau kebutuhan terhadap perumahan yang lebih tinggi. Akan tetapi ada kecenderungan pemenuhan kebutuhan akan perumahan relatif sulit bagi kebanyakan orang, karena masih relatif rendah daya belinya. Selain hal tersebut di atas, kebutuhan-kebutuhan akan air bersih, penanganan persampahan dan drainase juga perlu ditangani dengan baik.

Penurunan kualitas infrastruktur yang cukup memprihatinkan terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar Kabupaten/Kota perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dikarenakan prasarana tersebut merupakan pilar

utama yang dapat membuka akses ke daerah-daerah lain dengan relatif mudah.

Informasi memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi di era globalisasi dalam kerangka menopang pertumbuhan dan daya saing daerah, baik secara nasional maupun internasional. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi pada akhirnya akan menimbulkan keterbelakangan dan kesenjangan digital. Pengembangan telematika di masa mendatang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan atau pembangunan infrastruktur telematika, dan tidak merata penyebarannya. Terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, serta swasta dengan masyarakat.

Tantangan jangka panjang ke depan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa hunian kumuh, mewujudkan sistem drainase dan persampahan yang baik. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara yang semakin baik. Semakin meningkatnya kemajuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat juga menuntut adanya penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan telematika.

Semakin berkurangnya kemampuan sumber dana dari pemerintah, maka tuntutan memanfaatkan sumber-sumber dana dari masyarakat dan kemampuan membuka peluang kerjasama kepada para pengusaha atau badan usaha swasta dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana, merupakan keniscayaan.

2.1.6.2 Kondisi Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang serta Pelayanan Pertanahan

Wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan kaya akan potensi sumberdaya alam harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kalimantan Tengah. Pemanfaatan ruang harus lebih produktif sesuai dengan penggunaan atau peruntukkan terbaiknya (*best use*) serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Pemanfaatan, pengawasan tata ruang serta pelayanan pertanahan yang tidak baik akan cenderung menimbulkan konflik-konflik pertanahan, pengusuran, kesulitan dalam penyediaan tanah

untuk fasilitas umum, berkembangnya kegiatan spekulasi tanah, kesulitan dalam penyediaan lahan permukiman, serta masalah-masalah pertanahan lainnya.

Hingga saat ini, pengendalian terhadap RTRW masih relatif belum optimal sehingga pemanfaatan tanah dan lahan seringkali tidak sesuai dengan penggunaan atau peruntukkan terbaiknya (*best use*), seperti yang telah ditetapkan pada RTRW-nya. Akibatnya konflik-konflik lahan dan pertanahan masih relatif mungkin untuk terjadi, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah pembukaan dan pemanfaatan tanah adat dan ulayat. Sejak sekarang ini perlu dipikirkan aturan tentang izin pembukaan dan pemanfaatan tanah serta kriteria tanah adat dan ulayat. Resikonya adalah tingkat kepastian dalam pembukaan dan pemanfaatan akan relatif lebih rendah sehingga mengurangi animo masyarakat dan investor dalam peningkatan produktivitas ruang di wilayah Kalimantan Tengah.

2.1.7 Pemerintahan

2.1.7.1 Kondisi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pengalaman pahit kerusuhan Sampit yang terjadi pada tahun 2001 lalu merupakan kejadian yang tak boleh terulang kembali, dan harus menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi baru bagi penciptaan kerukunan hidup antar suku, agama, ras, golongan secara berkelanjutan.

Reformasi dan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini telah menyebabkan masyarakat cukup bebas dalam mengekspresikan kepentingannya. Namun demikian, ekspresi masyarakat ini kadang berlebihan dan cenderung menjadi *euphoria* yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah eksekusi globalisasi. Cukup bebasnya pergerakan orang, barang dan informasi terkadang telah menyebabkan sikap-sikap antisosial dalam kehidupan masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Selama ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang diarahkan pada penciptaan ketertiban dan ketentraman umum. Namun demikian, kebijakan dan program-program tersebut masih cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek dan bukan sebagai pelaku aktif yang diarahkan pada

penciptaan sistem swadaya dan prakarsa yang inklusif dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Masalah lainnya adalah lemahnya penegakan hukum yang dapat dilihat dari perspektif kurang berjalannya sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan daerah. Terjadinya berbagai bentuk penyimpangan hukum yang cenderung tidak ditindak lanjuti dapat menjadi bumerang bagi penciptaan rasa ketentraman masyarakat.

Nilai-nilai luhur budaya seperti kerukunan sosial, kesetiakawanan sosial, huma betang, isen mulang yang dipadukan dengan kelembagaan yang ada dalam masyarakat seperti RT, RW, Damang selanjutnya harus menjadi dasar pijakan pengembangan kebijakan ketertiban dan ketentraman umum.

2.1.7.2 Kondisi Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Berlangsungnya pelayanan publik yang paling dasar dan pelayanan penunjang ke masyarakat dalam secara efisien dan efektif akan berpengaruh positif bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini upaya peningkatan keberfungsian perangkat daerah pemerintah provinsi dan kabupaten kota masih terhambat oleh belum lengkapnya aturan hukum, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dari pengembangan otonomi daerah. Sementara itu, inovasi kebijakan untuk peningkatan kualitas satuan kerja perangkat daerah sangat lemah karena dibayangi oleh dakwaan "tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku".

Namun demikian, kondisi di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat pembenar untuk tidak meningkatkan kinerja dan prestasi kerja. Hal yang perlu ditingkatkan secara signifikan adalah peningkatan kualitas pelayanan di tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, mengurangi tumpang tindih kegiatan antar satuan kerja dan antar daerah, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, peningkatan peran DPRD agar lebih transformatif dan tidak terjebak pada arena perebutan kekuasaan, peningkatan komunikasi kebijakan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan peran partai politik dan peran kelompok-kelompok masyarakat, peningkatan transparansi kebijakan publik, peningkatan manajemen keuangan daerah agar lebih berorientasi pada upaya pemampuan masyarakat, serta tema-tema lain yang bermuara untuk mewujudkan pemerintah

yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi

Kondisi umum geomorfologi di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diprediksikan tetap dalam keadaan sebagaimana dipaparkan dalam uraian kondisi umum di atas. Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Tengah berada diluar jalur gempa tektonik maupun vulkanik sehingga perubahan rupa bumi dan kelerengan permukaan cenderung statis. Kondisi yang mungkin akan berubah adalah pada karakteristik iklim yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk diantaranya pemanasan global, degradasi lingkungan dan lain sebagainya.

2.2.2. Lingkungan Hidup

Struktur ekonomi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih akan didominasi oleh sektor ekonomi primer yaitu pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Meskipun demikian, sedikit demi sedikit peranan sektor sekunder terutama industri pengolahan dan sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan dan jasa akan semakin membesar sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik. Dominasi sektor primer dalam struktur ekonomi Kalimantan Tengah yang akan berlangsung cukup lama dengan konsekuensi eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus dan intensitas yang cukup tinggi, berdampak pada tingginya tekanan kepada lingkungan hidup. Prediksi kondisi lingkungan hidup pada 20 tahun yang akan datang sangat tergantung dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pada kurun waktu tersebut. Jika kebijakan pembangunan semata-mata hanya ditekanan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, diperkirakan kondisi lingkungan hidup akan mengalami degradasi yang sangat parah mengingat kondisi ekologis Kalimantan Tengah yang cukup rawan jika dieksploitasi secara berlebihan. Namun jika kebijakan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, maka kondisi lingkungan hidup relatif jauh lebih baik. Dengan demikian penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai arus utama dalam pembangunan akan menjadi penentu kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

2.2.3. Demografi

Berdasarkan data dari BPS Kalimantan Tengah (2009) jumlah, pertambahan dan pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah tahun 2004-2009 disajikan pada tabel 2.11.

TABEL 2.11 **JUMLAH, PERTAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2004-2009**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2004	1.913.788		
2005	1.958.428	44.640	2,33
2006	2.004.110	45.682	2,33
2007	2.047.214	43.104	2,15
2008	2.132.838	85.624	4,18
2009	2.194.000	61.162	2,87

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2009

Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2025 ditampilkan pada tabel 2.12, dimana pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Kalimantan Tengah sebanyak 3.414.400 jiwa.

TABEL 2.12 **PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2015, 2020 dan 2025**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010	2.439.900
2011	2.502.300
2012	2.566.000
2013	2.628.800
2014	2.669.600
2015	2.757.200
2020	3.085.800
2025	3.414.400

Sumber : Hasil Analisis BPS Prov. Kalteng, 2009

Perhatian pada pengembangan dan pemampuan keluarga harus lebih ditingkatkan. Pemampuan keluarga merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia. Keluarga yang fungsional akan menentukan kapasitas

anggota keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga.

Hingga saat ini, pelayanan di bidang kependudukan masih cenderung berorientasi pada penyediaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Upaya-upaya pemampuan keluarga masih terabaikan sehingga peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah.

Dalam rangka pemampuan keluarga ini, perlu diupayakan peningkatan kemampuan *parenting* (keorangtuaan) untuk internalisasi ketrampilan hidup dan bersosialisasi, serta optimalisasi peran orang tua (bapak dan ibu di dalam keluarga), optimalisasi anak remaja dalam konsep keluarga berencana yang sejahtera.

Sedangkan permasalahan kependudukan yang bersifat umum menyangkut optimalisasi peran transmigrasi bagi pengembangan wilayah dan tidak sekedar dipandang sebagai upaya pemerataan kepadatan penduduk semata, peningkatan sistem informasi kependudukan untuk menjamin adanya data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perumusan bidang kependudukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah revitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai alat peningkatan kualitas keluarga, dan tidak hanya berorientasi menyediakan surat-surat administrasi kependudukan dan catatan sipil.

2.2.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dalam struktur ekonomi Kalimantan Tengah dari sektor ekonomi yang didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam melalui penebangan hutan alam ke arah ekonomi yang didominasi budidaya perkebunan terutama kelapa sawit. Pada rentang waktu 20 tahun yang akan datang, struktur ekonomi Kalimantan Tengah masih akan didominasi oleh sektor primer yakni pertanian dalam arti luas serta pertambangan. Perkembangan sektor pertanian terutama akan berasal dari sub sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di wilayah Barat yaitu di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Katingan. Sedangkan sektor pertambangan terutama batubara diprediksikan akan berkembang cepat di wilayah Timur yakni di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan Barito Timur dan Barito Selatan. Sektor lainnya yang diperkirakan berpotensi untuk berkembang pesat pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang adalah sub sektor kelautan dan perikanan. Melihat trend pertumbuhan sub sektor ini selama 10 tahun terakhir serta potensi panjang pantai dan sumber daya perairan yang dimiliki Kalimantan Tengah, diperkirakan sub sektor ini akan tumbuh cepat pada rentang waktu 20 tahun ke depan. Tantangan yang dihadapi dan sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi pada kurun 20 tahun

yang akan datang adalah bagaimana menyediakan infrastruktur yang memadai dan bagaimana mendorong laju investasi agar mampu menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan agar keadilan dan kemakmuran dapat tercapai di Kalimantan Tengah.

2.2.5. Sosial Budaya dan Politik

Perkembangan sosial budaya dan politik di Kalimantan Tengah selama 20 tahun yang akan datang akan sangat terkait dengan perkembangan bidang lainnya terutama perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Jika selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang kondisi ekonomi daerah dapat berkembang baik dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berkembang pesat, maka permasalahan rendahnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan minimal akan bisa diatasi. Kondisi ini akan membuat pemerintah lebih berkonsentrasi pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan asumsi bahwa semua pihak termasuk pemerintah akan konsisten meneruskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dijalankan untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang didukung dengan pengembangan ekonomi kerakyatan serta laju investasi di daerah yang selalu meningkat setiap tahun, maka dalam 20 tahun ke depan diperkirakan angka kemiskinan bisa mendekati nol persen. Demikian pula dengan angka pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi di daerah. Disamping itu juga akan dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari luar daerah sebagai akibat dari daya tarik ekonomi di Kalimantan Tengah. Pada kurun waktu 20 tahun ke depan, tidak bisa dihindari bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu tujuan migrasi penduduk dari luar daerah.

Kondisi politik di daerah akan sangat mempengaruhi proses pembangunan di daerah. Setelah peristiwa Sampit yang terjadi pada tahun 2001, kondisi politik di Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini relatif aman dan stabil. Hal ini menjadi modal yang cukup berharga untuk terus dipertahankan. Menyadari bahwa masyarakat Kalimantan Tengah mempunyai keberagaman etnis dan latar belakang budaya yang cukup besar, maka keberagaman dan perbedaan ini harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik di daerah. Dengan demikian maka kondisi sosial politik dalam kurun 20 tahun yang akan datang, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.

2.2.6. Prasarana dan Sarana

Dengan luas wilayah yang begitu besar dan dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang memadai sampai dengan saat ini, secara alamiah Kalimantan Tengah masih sangat banyak membutuhkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana agar dapat mendayagunakan semua potensi

sumber daya yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah serta trend kenaikan anggaran pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana hampir dapat dipastikan bahwa jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari anggaran pemerintah, Kalimantan Tengah tidak akan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi daerah secara optimal pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan darat, jembatan, pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, sarana angkutan sungai, dll diperlukan investasi yang sangat besar.

Salah satu alternatif untuk mengatasi hal ini adalah melalui pembangunan infrastruktur dengan pola PPP (*Public Private Partnership*).

2.2.7. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimekarkan dari 1 Kota dan 5 Kabupaten menjadi 1 Kota dan 13 Kabupaten. Pemekaran wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Jika pada tahap awal hal ini belum dapat berjalan optimal, maka pada 20 tahun ke depan diharapkan kabupaten pemekaran mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan komitmen dari Pemerintah dan berbagai pihak terkait serta dengan perkembangan ekonomi yang digerakkan melalui percepatan investasi di semua kabupaten pemekaran, pada 20 tahun ke depan diharapkan semua kabupaten pemekaran bisa berkembang, mandiri dan berkemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.

2.3. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan memperhatikan kondisi umum wilayah, baik kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, yang dirinci dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagai berikut:

A. Kekuatan

- 1) Kekayaan Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, antara lain: Lahan yang luas, potensi batu bara, hutan, wilayah laut dan pesisir dengan panjang pantai 750 km.
- 2) Kondisi geologi Kalimantan Tengah yang bebas terhadap bahaya gempa bumi.
- 3) Terciptanya budaya/falsafah Rumah Betang yang toleran dan akomodatif.
- 4) Secara geografis posisi Kalimantan Tengah terletak di tengah-tengah wilayah NKRI.

- 5) Kalimantan Tengah pernah direncanakan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

B. Kelemahan

- 1) Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.
- 2) Kondisi tanah yang labil terutama di bagian selatan Kalimantan Tengah, menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi relatif lebih mahal.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain.
- 4) Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah relatif masih rendah.
- 5) Masih rendahnya penguasaan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.
- 6) Masih adanya sebagian masyarakat yang cenderung menganut budaya mengambil sumber daya alam dari pada menanam.

C. Peluang

- 1) Adanya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yang dapat memotivasi dan memacu daerah untuk lebih leluasa dalam mengembangkan potensi daerahnya.
- 2) Adanya faktor kepemimpinan yang visioner, kuat dan konsisten.
- 3) Dalam era globalisasi ini perhatian dan dukungan masyarakat internasional terhadap kelestarian lingkungan semakin kuat.
- 4) Adanya komitmen Pemerintah terhadap pemberantasan *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing*.
- 5) Adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan “*Good Governance*”
- 6) Adanya kebijakan Pemerintah untuk mendorong Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta.
- 7) Adanya kebijakan Pemerintah dalam penganggaran fungsi pendidikan sebesar 20%, memberi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang pendidikan.

D. Tantangan

- 1) Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi Pemerintah di daerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah.

- 2) Kurangnya peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
- 3) Jumlah penduduk Kalimantan Tengah yang relatif masih sedikit, belum sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dikelola.
- 4) Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh Pemerintah yang kurang berpihak ke Wilayah Indonesia Bagian Timur.
- 5) Adanya kebijakan global yang menghambat produksi negara-negara berkembang, seperti komoditas kelapa sawit.
- 6) Globalisasi dengan berbagai implikasinya, seperti berlakunya AFTA tahun 2003, *eco-labeling*, dan APEC pada tahun 2020. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam perdagangan internasional, maka aspek ketepatan (mutu, waktu, jumlah, harga, dll.) sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan global. Apabila kita tidak siap maka tidak mustahil kita menjadi penonton di negeri sendiri.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

3.1.1 Perkembangan Lingkungan Global

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa isu-isu yang bersifat global yakni meningkatnya kerjasama ekonomi, HAM serta lingkungan hidup. Dengan telah berakhirnya era perang dingin, dimana pada saat itu fokus perhatian dunia banyak diarahkan pada masalah-masalah ideologi, politik dan hankam maka kedepan maka hal ini akan bergeser kepada bidang ekonomi, meskipun masalah tersebut tidak akan diabaikan sama sekali. Hal ini ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, G-8 dan lain sebagainya.

Hal lain yang menjadi fokus perhatian dunia kedepan adalah masalah/isu HAM, dimana dimasa lalu masalah ini kurang mendapat sorotan. Hal ini ditandai oleh banyaknya permasalahan yang dikaitkan dengan masalah HAM. Apabila hal ini tidak disikapi secara arif dan bijaksana akan sangat berbahaya. Apabila penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan akan dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya hal lain yang akan menjadi sorotan dunia adalah masalah lingkungan hidup. Isu lingkungan ini mengemuka karena adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena adanya tanda-tanda/indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal. Untuk menyelamatkannya dari kehancuran maka perlu dilakukan upaya-upaya nyata sehingga semua aktivitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

3.1.2 Perkembangan Lingkungan Regional

Kawasan regional yang akan ditelaah disini adalah kawasan Asia Pasifik dan Asean, mengingat kedua kawasan ini sangat mempengaruhi Indonesia pada umumnya, Kalimantan Tengah pada khususnya. Masalah kerjasama ekonomi, demokratisasi dan HAM serta lingkungan hidup juga menjadi isu-isu yang cukup menonjol dikawasan Asia Pasifik dan Asean.

APEC merupakan organisasi negara-negara dikawasan Asia Pasifik dimana tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. Demikian pula halnya Asean selain dalam bidang lain, dibidang

ekonomi juga sudah mulai di galang diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Bahkan kerjasama ekonomi diantara negara-negara di kawasan Sub Regional pun telah banyak di bentuk diantaranya adalah BIMP EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippine – East Asia Growth Area).

Masalah demokratisasi dan HAM juga merupakan isu-isu yang cukup menonjol di kawasan Asia Pasifik dan Asean. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakatnya saat ini sudah semakin kritis dalam menyikapi berbagai macam persoalan dan mereka menuntut peran dan porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan berbagai pembangunan politik, sosial dan ekonomi. Kasus-kasus yang terjadi di Filipina, Thailand dan Malaysia akhir-akhir ini adalah beberapa contoh dari hal tersebut.

3.1.3 Perkembangan Lingkungan Nasional

Melihat kecenderungan perkembangan beberapa tahun terakhir ini, paling tidak ada empat isu strategis yang menonjol yang berskala nasional yakni demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan otonomi daerah.

3.1.3.1. Demokratisasi

Isu demokratisasi bukan hanya terjadi pada tataran global dan regional saja tetapi juga tumbuh pesat di lingkup nasional. Bahkan di tingkat nasional isu demokratisasi ini cenderung kebabalasan. Mengingat “keran” demokrasi baru dibuka beberapa tahun terakhir ini, maka hal di atas cenderung dapat dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran. Saat ini masyarakat menuntut peran dan porsi yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan dari rezim sebelumnya.

3.1.3.2. Hak Asasi Manusia

Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM seperti Komnas HAM, Departemen Kehakiman dan HAM, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir-akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian dunia ke depan.

3.1.3.3. Lingkungan Hidup

Masalah kelestarian lingkungan hidup akan tetap menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia ke depan. Sebagaimana halnya pada lingkup global, pada tataran nasionalpun masalah lingkungan hidup ini akan

tetap menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Adanya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup di suatu daerah akan dengan sangat cepat menjadi berita nasional. Masalah kerusakan lingkungan hidup di suatu daerah sering menjadi *headline* berita dari surat-surat kabar nasional.

3.1.3.4. Otonomi Daerah

Dengan pemberlakuan otonomi daerah seiring dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan utama dari pemberlakuan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak *success story* dari pemberlakuan otonomi daerah ini namun tidak sedikit pula yang sebaliknya. Bagi daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus bekerja lebih keras lagi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

3.2. Peluang dan Kendala

3.2.1. Peluang

- 1). Adanya kecenderungan dunia, dan kawasan regional untuk membangun dan meningkatkan kerjasama ekonomi akan menjadi peluang bagi Kalimantan Tengah untuk menciptakan dan memperluas pasar ekspor untuk berbagai jenis komoditas.
- 2). Isu lingkungan baik lingkup global, regional dan nasional dapat dijadikan faktor pendorong dan merupakan peluang bagi Kalimantan Tengah untuk melestarikan lingkungan hidupnya.
- 3). Meningkatnya isu demokratisasi akan memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan.
- 4). Adanya kebijakan otonomi daerah akan memberikan peluang bagi daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan di daerah.

3.2.2. Kendala

- 1). Praktek perdagangan bebas di satu pihak dapat merupakan peluang bagi suatu daerah namun apabila tidak siap, maka hal-hal yang tadinya menjadi peluang dapat berubah menjadi kendala/tantangan. Kata kuncinya disini adalah daya saing dimana faktor utama dari daya saing adalah efisiensi.
- 2). Di satu pihak isu lingkungan hidup adalah suatu peluang untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup secara benar. Namun apabila kita tidak mampu

mengelola lingkungan hidup dengan baik, maka hal ini menjadi permasalahan serius di forum nasional dan internasional.

- 3). Mengelola demokratisasi ibarat memelihara burung. Apabila terlalu kuat memegangnya bisa saja burung tersebut mengalami kesulitan untuk hidup dan lama-lama bisa mati. Namun sebaliknya apabila terlalu longgar, ada kemungkinan burung bisa bergerak tidak terkontrol dan bahkan lepas.
- 4). Dengan pengelolaan yang tepat, otonomi daerah dapat menjadi sarana untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Sebaliknya apabila salah dalam pengelolaanya maka otonomi daerah tersebut tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Rencana pembangunan harus terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintahan. Optimalisasi partisipasi dan peran para pelaku pembangunan harus ditingkatkan secara terkoordinir untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan arahan sistem perencanaan nasional dan dengan mempertimbangkan konteks wilayah, tantangan pembangunan daerah yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, koridor kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka visi dan misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah dalam jangka 2005 hingga 2025 adalah seperti yang diuraikan pada bagian berikut ini.

4.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005-2025

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Pilihan pada visi di atas didasarkan pada situasi dan kondisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintahan.

Visi Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 ini adalah landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Indikasi terwujudnya kondisi masa depan bersama tersebut ditandai oleh hal-hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tingkat kemajuan dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan pemerataannya, maka suatu daerah dapat dikatakan lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya juga merupakan daerah yang sektor industri dan sektor

jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung secara efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejala yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya yang terlembaga secara sistemik.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin tinggi. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang berada di daerah yang bersangkutan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah yang maju juga ditandai dengan Lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan pertahanan.

Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan bukan hanya Kalimantan Tengah yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.

Kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah dalam NKRI maupun masyarakat bangsa-bangsa.

Kemandirian suatu Daerah tercermin pada kemampuan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan sosial dan ekonomi tetapi memiliki daya tahan dan daya suai yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomian. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya.

Dengan demikian, kemajuan dan kemandirian suatu Daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat suatu Daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan.

Kalimantan Tengah yang ingin dibangun bukan hanya sebagai masyarakat dan Daerah yang maju dan mandiri, tetapi juga adalah Kalimantan Tengah yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai hak, baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat di Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian Kalimantan Tengah yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender, dan wilayah.

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

- 1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.**

Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kalimantan Tengah. Ketersediaan sarana dan prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat

berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berdiri dapat diturunkan sehingga daya saing produk / jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Derajat kemajuan dan kemandirian Daerah Kalimantan Tengah akan berpusat dari potensi dan kekayaan alamnya. Berkembangnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan merupakan pondasi bagi transformasi struktur perekonomian dan kemandirian daerah Kalimantan Tengah.

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.

Misi ini diperlukan untuk meningkatkan akselerasi perkembangan dunia usaha di Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan kapasitas pengusaha lokal yang masih relatif rendah, maka upaya peningkatan penanaman modal dari luar daerah dan luar negeri di usaha-usaha yang berbasis potensi dan keunggulan wilayah merupakan langkah tepat untuk peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Bila kondisi ini terwujud, maka ragam pilihan usaha akan berkembang sehingga memungkinkan jumlah dan jenis usaha skala kecil dan menengah dapat berkembang lebih cepat.

4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

Bertambahnya jumlah, jenis dan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perlu dicatat bahwa perkembangan lebih lanjut akan sulit terwujud jika usaha-usaha tersebut tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah serta tidak memiliki keterkaitan usaha yang kuat, baik antar usaha maupun antar wilayah. Usaha yang tidak berbasis pada potensi dan keunggulan wilayah akan sulit dalam mencari bahan baku, dan bilapun mampu berkembang, justru akan menyerap daya beli masyarakat ke luar Daerah Kalimantan Tengah. Dengan dasar berpikir seperti ini, maka perkembangan usaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah akan mampu menarik daya beli dari luar wilayah melalui ekspor hasil usahanya. Dampak pengganda (*multiplier*) dari usaha ini akan dapat lebih ditingkatkan jika kemitraan antar usaha dan antar daerah dapat dibangun sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku umum.

- 5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.**

Kapasitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh budaya belajarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga; kapasitasnya akan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan bila lembaga tersebut mampu menjadi *learning organization*. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang harus dapat mewujudkan budaya belajar bagi peserta didiknya. Selain itu, lembaga pendidikan pada semua pada semua jenis, jalur dan jenjang harus mampu menjadi *learning organization* agar selalu mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi idealnya secara lebih berhasil dan berdaya guna. Dengan cara seperti ini, kecepatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penuntasan wajib belajar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta aspek lain dari pendidikan harus diprioritaskan.

- 6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.**

Sehat dan berumur panjang merupakan faktor utama pembentuk kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan semua peluang yang dihadapi untuk peningkatan kesejahteraannya. Dengan terwujudnya masyarakat berparadigma sehat ini, upaya peningkatan kesehatan akan semakin mudah karena masyarakat akan lebih aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan ibu hamil serta anggota keluarganya, kualitas kesehatan bayi dan balitanya, kesehatan lingkungan, serta pengendalian dan pencegahan penyakit menular.

- 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.**

Pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan yang responsif dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, juga merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi seperti ini, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, khususnya pelayanan yang paling dasar. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan untuk percepatan pembudayaan pertanggungjawaban kinerja.

- 8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Ketentraman dan ketertiban akan dapat diciptakan secara lebih efektif saat masyarakat berdaya dan berfungsi optimal dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya. Berdasarkan kondisi seperti ini potensi modal sosial di masyarakat harus dapat direalisasikan untuk menjamin kelanggengan keberfungsian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

- 9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.**

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan harus dapat direspon secara cepat dan tepat. Oleh karena itu sejak mulai sekarang perlu dibangun suatu kemitraan yang sistematis antar para pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat agar pencegahan dan kecepatan penanggulangan permasalahan sosial kemasyarakatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

- 10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.**

Unit sosial terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Pemampuan keluarga merupakan salah satu pilihan dalam strategi pembangunan manusia. Keluarga yang fungsional, mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi psikologi dan sosial, akan menentukan kapasitas anggota keluarga tersebut. Peningkatan kemampuan belajar, etos kerja dan semangat juang, serta kondisi kesehatannya tetap dimulai dari keluarga. Selain itu, dalam upaya pencegahan (antisipasi) kemiskinan, maka peningkatan kualitas keluarga menjadi sangat vital dan strategis.

Peningkatan kualitas kependudukan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi seperti itu, dalam misi ini juga perlu diupayakan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hubungan industrial. Hal ini sedemikian karena sangat terkait dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi kerentanan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pengurangan pada pengangguran harus disebut secara eksplisit agar koordinasi kegiatan antar satuan kerja menjadi semakin vital sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

- 11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.**

Alam dan ekosistem tempat manusia hidup memberikan manfaat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Alam dan ekosistem tersebut merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Lingkungan hidup harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengganggu kelestariannya sepanjang waktu.

- 12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.**

Ruang dan unit-unit wilayah harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kata produktivitas yang ada dalam misi ini mengisyaratkan bahwa ruang yang belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, keterkaitan antar unit wilayah dikembangkan dan dikendalikan untuk mengurangi biaya-biaya sosial dan ekonomi serta dampak negatif yang mungkin muncul di tahun-tahun yang akan datang.

4.2 Tujuan dan Sasaran RPJPD

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tercapainya masyarakat Kalimantan Tengah yang maju mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- 1. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh:**
 - a. Meningkatnya ketepatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - c. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.

- 2. Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, yang ditandai oleh:**
 - a. Terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan.
 - b. Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional.
 - c. Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
 - d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
 - e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.
 - f. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
 - g. Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, yang ditunjukkan oleh:**
 - a. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memperkuat kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
 - c. Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata secara optimal.
- 4. Terwujudnya peningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, yang ditunjukkan oleh:**
 - a. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan koperasi yang berbasis potensi dan keunggulan daerah.

- b. Meningkatnya perkembangan dan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri.
 - c. Berkembangnya usaha sentra/klaster, Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Sentra Produksi – Koperasi (KSP/USP-Kop) dan jasa konsultasi pengembangan bisnis UKM dan koperasi.
 - d. Terwujudnya kinerja pelayanan perijinan dan pengawasan perijinan serta fasilitasi pengembangan UKM.
 - e. Terwujudnya stabilitas perekonomian wilayah Kalimantan Tengah.
- 5. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan.
 - c. Terwujudnya kualitas, kuantitas, kesejahteraan, dan penyebaran tenaga pendidik secara adil.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi pendidikan.
 - e. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 6. Terwujudnya masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga kesehatan.
 - b. Terwujudnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
 - c. Terwujudnya kualitas pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.
 - d. Terwujudnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.
 - e. Terkendalinya peredaran obat dan makanan serta ketersediaan obat.
 - f. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga kedaerah terpencil.

- g. Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan.
- 7. Terwujudnya pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - d. Terlaksananya tata pemerintahan yang baik.
 - e. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya manusia aparatur .
 - f. Terwujudnya profesionalisme aparat pemerintah daerah.
 - g. Meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah.
 - h. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya perkembangan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta berkembangnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan.
 - b. Terwujudnya kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum.
 - c. Terwujudnya disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
 - d. Terwujudnya kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b. Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan aktualisasi potensi kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial.
 - c. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial.
 - d. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil-berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil dan berkualitas.
 - b. Terwujudnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d. Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun perkotaan.
 - e. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 - f. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja.
- 11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh:**
- a. Terwujudnya kapasitas sarana, prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Terwujudnya wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan.
 - c. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup.
 - d. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan.

- e. Terwujudnya keberdayaan perusahaan, masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi.

12. Terwujudnya optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya tertib hukum tata ruang dan pertanahan.
- b. Terwujudnya tertib administrasi tata ruang dan pertanahan.
- c. Terwujudnya tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan.
- d. Terwujudnya pemeliharaan tata ruang dan pertanahan.

BAB V

**ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

5.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Arah pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.**
 - a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, diarahkan untuk :
 - 1) Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang, jasa dan orang pada semua jenis moda.
 - 2) Meningkatnya kelancaran transportasi darat, laut, udara dan kereta api.
 - 3) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, lingkungan sehat, dan komunitas perumahan.
 - 4) Meningkatnya kualitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal dan keterkaitan antar perkotaan.
 - 5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sehat dan meningkatnya pengelolaan air limbah.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya keberfungsian masyarakat dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum lingkungan sekitarnya.
 - 2) Meningkatnya kualitas ketertiban bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan.
 - 3) Meningkatnya kualitas kemitraan pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan (ASDP), serta perumahan dan permukiman.

- c. Peningkatan kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kemampuan penerapan teknologi konstruksi dan uji mutu konstruksi.
 - 2) Meningkatnya kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

- a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan di tiap daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk yang mampu berdaya saing nasional dan internasional untuk mewujudkan struktur perekonomian yang dibangun dari sektor agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif.
- c. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam diarahkan untuk menjaga kondisi keseimbangan ekosistem sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan.
- d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif.
- e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan.
 - 2) Meningkatnya stok ikan pada perairan umum serta terkelolanya ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan.
- f. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan menjaga keseimbangan ekosistem, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya keteraturan dan ketertiban pemanfaatan dan realisasi potensi sumberdaya hutan.
 - 2) Meningkatnya luas dan kualitas hutan tanaman.
 - 3) Menguatnya peran masyarakat sekitar hutan untuk dapat berperan sebagai pelaku pengelolaan hutan yang sesungguhnya.
- g. Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan

dan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memperkuat kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal.
 - 2) Meningkatnya kerjasama perencanaan penanamam modal.
 - 3) Meningkatnya kualitas kerjasama investasi dalam rangka peningkatan jumlah investasi.
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan dalam pelayanan modal ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan daya saing pariwisata melalui peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata secara optimal diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya sadar wisata masyarakat Kalimantan Tengah.
 - 3) Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten/Kota.
 - 4) Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya Dayak dan wisata alam sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif.

4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

- a. Peningkatan jumlah pembukaan lapangan usaha baru, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya jumlah pembukaan lapangan usaha baru, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah.
 - 2) Meningkatnya jumlah pembukaan usaha koperasi pada lapangan usaha yang potensial sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

- b. Peningkatan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya daya saing usaha di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Meningkatnya kinerja koperasi pada semua jenis lapangan usaha sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapinya.
 - 3) Meningkatnya ekspor Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Peningkatan sentra/klaster, KSP-Kop dan jasa konsultansi pengembangan bisnis UKM dan koperasi diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kemampuan dunia usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada semua sektor.
 - 2) Meningkatnya sentra/klaster dan KSP/USP-Kop dalam peningkatan aksesibilitas usaha.
 - 3) Meningkatnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam pengembangan daya saing usaha.
- d. Peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta fasilitasi pengembangan UKM diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Terkendalinya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berdampak negatif bagi masyarakat, perusahaan lain dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan stabilitas perekonomian wilayah Kalimantan Tengah diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari sembilan bahan pokok, bahan bakar minyak serta barang-barang strategis lain sesuai dengan kondisi permintaannya.
 - 2) Meningkatnya kepastian transaksi perekonomian di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

- a. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif dan inovatif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan ini diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya fungsi satuan-satuan pendidikan non formal.
 - 2) Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan non formal.
 - 3) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan, pusat-pusat pembelajaran masyarakat untuk menunjang budaya belajar masyarakat.
 - 4) Penguatan sinergi antara perpustakaan dan kearsipan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat.
 - 5) Tersosialisasinya budaya pembelajaran dan jam belajar masyarakat kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di kabupaten/kota.
- c. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik ini diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penyebaran tenaga pendidik, baik pada pendidikan formal maupun non formal.
 - 2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik yang didasarkan pada prestasi dan profesi.
 - 3) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di lokasi terpencil.
- d. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pendidikan serta pengembangan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas manajemen di satuan-satuan pendidikan dan pusat-pusat pembelajaran serta mendorong pengembangan teknologi informasi.
- e. Pengelolaan keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya pelestarian (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 - 2) Meningkatnya keberfungsian objek-objek wisata di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pelestarian (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 - 3) Meningkatnya dialog antar budaya lokal dan nasional untuk memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

- 6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.**
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota.
 - b. Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, diarahkan untuk:
 - 1) Membudayanya pola hidup sehat dan bersih.
 - 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
 - c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini, diarahkan untuk terwujudnya upaya kesehatan bersumber masyarakat (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda.
 - d. Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, diarahkan untuk:
 - 1) Terlaksananya jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pusat-pusat kesehatan masyarakat, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - e. Peningkatan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya jaminan keamanan pangan dan pengendalian bahan berbahaya.
 - 2) Terkendalinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA).
 - 3) Meningkatnya mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan baku mutu.
 - 5) Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
 - 6) Meningkatnya keterjangkauan penduduk miskin terhadap obat dan perbekalan kesehatan.
 - 7) Meningkatnya pemanfaatan obat bahan alam Indonesia.

- 8) Terwujudnya standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.
- f. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga ke daerah terpencil, diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.
 - 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.
 - 3) Terwujudnya peningkatan imunisasi.
 - 4) Terlaksananya peningkatan pendidikan gizi.
 - 5) Tertanggulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
- g. Peningkatan usaha kesehatan perorangan, diarahkan untuk:
- 1) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit Kelas III.
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan dan perbekalan rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan prioritas pada kabupaten hasil pemekaran.
 - 3) Termanfaatkannya sarana rumah sakit/Puskesmas serta jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Polindes) dengan memberikan pelayanan kesehatan prima.

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah ini diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan SKPD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Meningkatnya fungsi hasil pengaduan masyarakat untuk perbaikan kinerja SKPD Provinsi secara berkelanjutan.
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ini diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya pelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - 2) Meningkatnya pelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kabupaten / Kota.
 - d. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya fungsi DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk percepatan perwujudan kewajiban daerah otonom.
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD pada konstituennya dalam bidang politik.
 - 3) Meningkatnya kualitas komunikasi politik.
 - 4) Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - e. Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja SKPD Provinsi.
 - 2) Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja SKPD Kabupaten/Kota.
 - f. Peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah diarahkan untuk peningkatan profesionalitas aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - g. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah diarahkan untuk peningkatan hasil dan kinerja pengelolaan dan manajemen keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - h. Peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- a. Peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama serta wawasan kebangsaan, diarahkan untuk:

- 1) Meningkatnya fungsi kelembagaan politik yang dapat mensesuaikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.
 - 2) Meningkatnya fungsi Forum Komunikasi dan Konsultasi Pembauran Bangsa yang merekatkan berbagai kelompok suku, ras dan agama dalam satu persepsi wawasan kebangsaan.
 - 3) Meningkatnya fungsi kelembagaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pengembangan kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan untuk:
- 1) Terwujudnya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
 - 2) Meningkatnya kemampuan deteksi dini.
 - 3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan orang asing.
 - 4) Terwujudnya pemahaman masyarakat dan siswa tentang dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
 - 5) Terwujudnya sistem sosial kemasyarakatan anti narkoba.
 - 6) Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam bidang perlindungan masyarakat.
 - 7) Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam deteksi dini dan intelijen.
 - 8) Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Peningkatan ketertiban dan disiplin dalam penyampaian aspirasi, diarahkan untuk:
- 1) Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam berbagai event daerah.
 - 2) Terwujudnya pemasyarakatan keamanan dan ketertiban umum.
- d. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan.
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa.
 - 3) Terwujudnya masyarakat sadar HAM.

9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.

- a. Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Panti Sosial Tresna Wredha.
 - 2) Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial tuna sosial.
 - 3) Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
 - 4) Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat.
 - 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 - 6) Meningkatnya kualitas pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar.
 - 7) Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat.
 - 8) Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal.
- b. Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi kapital sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
 - 2) Meningkatnya keberdayaan LSM, organisasi sosial dan PMI dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
 - 3) Meningkatnya keberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial.
 - 4) Meningkatnya kualitas hasil kerjasama lintas sektor dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
 - 5) Meningkatnya pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
 - 6) Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
 - 7) Terwujudnya partisipasi swasta dalam peningkatan pelayanan Panti Sosial Tresna Wredha.

- 8) Meningkatnya keberdayaan PKK dalam menjalankan misi kesejahteraan sosial.
 - 9) Meningkatnya keberdayaan kader pemberdayaan masyarakat.
 - 10) Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat.
- c. Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial, diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana lainnya.
 - 2) Meningkatnya keberdayaan sosial korban bencana.
 - 3) Meningkatnya perlindungan sosial tindak kekerasan.
 - 4) Terwujudnya Askes jaminan sosial.
- d. Kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak, diarahkan untuk:
- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi (keberpihakan), terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan hukum.
 - 2) Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
 - 3) Terwujudnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
 - 4) Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 - 5) Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
 - 6) Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
 - 7) Mewujudkan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk pusat studi wanita/gender.

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

- a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, diarahkan untuk:
 - 1) Terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk.
 - 2) Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan keluarga kecil yang berkualitas sebagai pusat pembelajaran dan pembudayaan nilai-nilai.
 - 3) Meningkatnya penguatan kelembagaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Distribusi dan alokasi penduduk yang seimbang antar Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk peningkatan peran dan kualitas program transmigrasi sebagai strategi percepatan pengembangan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, diarahkan untuk:
 - 1) Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan, olah raga dan pramuka.
 - 2) Meningkatnya wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan.
 - 3) Meningkatnya prestasi olah raga Provinsi Kalimantan Tengah pada tingkat nasional.
 - 4) Meningkatnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 5) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana olah raga di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kesempatan kerja produktif, di perdesaan maupun perkotaan, diarahkan untuk pengurangan tingkat pengangguran dan setengah penganggur, baik yang bertempat di perdesaan maupun di perkotaan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja produktif, diarahkan untuk peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
- f. Pelembagaan hubungan industrial yang harmonis, diarahkan untuk terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi.

11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.

- a. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi dan SDM, diarahkan untuk:
 - 1) Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan laboratorium SDA yang mampu mendukung berbagai kebijakan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Terwujudnya penemuan serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengefisienkan serta mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam.
 - 3) Terwujudnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 - 4) Terwujudnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 - 5) Terwujudnya pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - 6) Terwujudnya pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
 - 7) Terwujudnya percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB/A)
 - 8) Terwujudnya pemanfaatan air bersih sungai, air sumur masyarakat, air bawah tanah, mata air pada semua desa.
 - 9) Meningkatnya ketertiban penggunaan sumber energi listrik.
 - 10) Terwujudnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara kalori rendah.
- b. Pengembangan wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan, diarahkan untuk peningkatan keberfungsian forum yang bersifat lintas sektoral serta *multi stakeholder* untuk sinkronisasi kebijakan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup, diarahkan untuk:
 - 1) Mewujudkan kesadaran hukum pada berbagai *stakeholder* daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Mewujudkan fasilitasi yang terstruktur terhadap penegakan hukum lingkungan di daerah.

- d. Peningkatan pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan, diarahkan untuk:
- 1) Terwujudnya kapasitas SDM yang handal dalam mengembangkan serta mengimplementasi pola pemanfaatan sumber daya yang aman serta ramah lingkungan.
 - 2) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Terwujudnya ketertiban pemanfaatan sumber daya pertambangan yang aman dan ramah lingkungan.
 - 4) Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air bawah tanah.
 - 5) Terwujudnya pelayanan perijinan pertambangan yang responsif dan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - 6) Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan *multi stakeholder* dalam eksplorasi sumber daya pertambangan.
 - 7) Terwujudnya pengembangan hutan kemasyarakatan (*social forestry*).
 - 8) Terwujudnya UKM kehutanan yang maju serta berdaya saing tinggi
- e. Peningkatan keberdayaan perusahaan dan masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang serasi, diarahkan untuk:
- 1) Meningkatnya kinerja pelaksanaan program LAMYAMSANG (Kolam, Ayam dan Pisang).
 - 2) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan wilayah pertambangan.
 - 3) Melembaganya (terbudayakannya) kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
 - 4) Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya kehutanan.
 - 5) Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya pertambangan.
 - 6) Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya alam
 - 7) Terwujudnya pengembangan hutan masyarakat.
 - 8) Terwujudnya penghijauan/hutan rakyat/kebun rakyat.

- 9) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya perikanan dan pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 10) Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian dan pengembangan keanekaragaman hayati.
- 11) Meningkatnya pengawasan dan pengamanan areal eks HPH.
- 12) Meningkatnya pengendalian limbah B3.

12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- a. Peningkatan tertib hukum tata ruang dan pertanahan, diarahkan untuk peningkatan tertib hukum dan kepastian hukum pemanfaatan dan penggunaan ruang dan pertanahan.
- b. Peningkatan tertib administrasi tata ruang dan pertanahan, diarahkan untuk peningkatan kualitas *output database* penatagunaan tanah, yang meliputi data kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah serta tanah terlantar.
- c. Peningkatan tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya ketertiban kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah (P3HT), termasuk mempertegas status hukum dan pengakuan terhadap tanah adat masyarakat Kalimantan Tengah.
 - 2) Terdistribusikannya tanah sesuai dengan potensi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan tertib pemeliharaan tata ruang dan pertanahan, diarahkan untuk:
 - 1) Meningkatnya kemampuan para pihak pengguna dan pemanfaat tanah dalam pemeliharaan tanah.
 - 2) Terkendalinya ekosistem dalam ruang dan tanah yang digunakan dan dimanfaatkan.
 - 3) Terlindunginya hak masyarakat adat atas kepemilikan tanahnya.

5.2 Tahapan dan Skala Prioritas

Upaya untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

5.2.1 RPJM ke-1 (2005 – 2010)

RPJM ke-1 merupakan tahap awal untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil. Berdasarkan kondisi dan konteks potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka visi pembangunan pada periode perencanaan 5 (lima) tahun pertama ini adalah:

MEMBUKA ISOLASI MENUJU KALIMANTAN TENGAH YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Isolasi wilayah akan dibuka untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya. Untuk itu, pembukaan keterisolasian tidak sekedar peningkatan aksesibilitas dari dan ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan Tengah. Pembukaan keterisolasian juga diarahkan untuk penguatan dan peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengorbankan kemampuan dan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan penguatan keterkaitan itu akan lebih membuka peluang usaha yang lebih besar kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam 5 (lima) tahun pertama ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

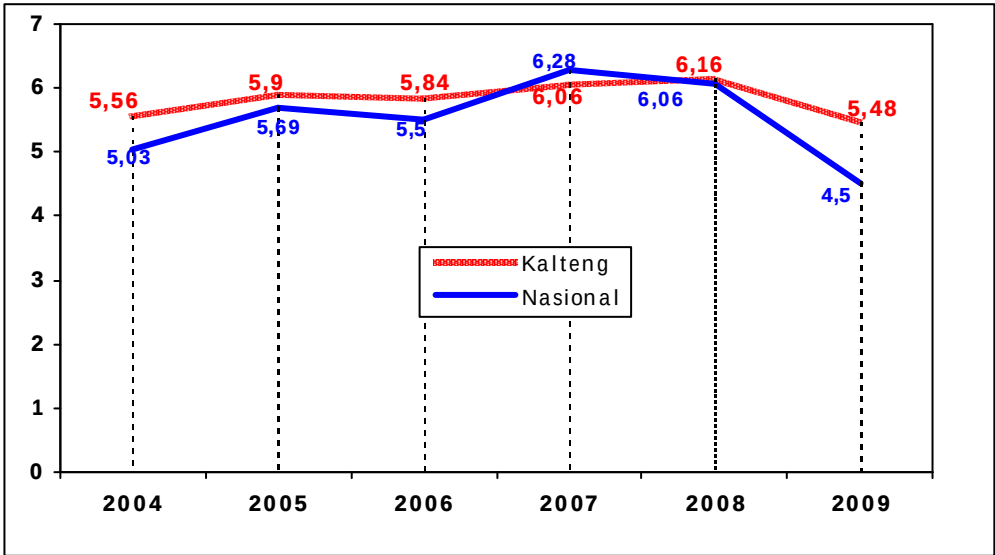
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

RPJM tahap ke-1 (2005-2010) telah diimplementasikan sampai tahun keempat. Adapun hasil-hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005-2009 antara lain adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2009 bertumbuh secara meyakinkan yakni sebesar 5,48%. Meskipun angka ini lebih kecil dibanding pertumbuhan tahun 2008 yang mencapai 6,18%, hal ini disebabkan adanya dampak krisis ekonomi global. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat nasional dimana pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,5% atau lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang mencapai 6,06%. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama enam tahun perekonomian Kalimantan Tengah (2004-2009) tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2004 - 2009

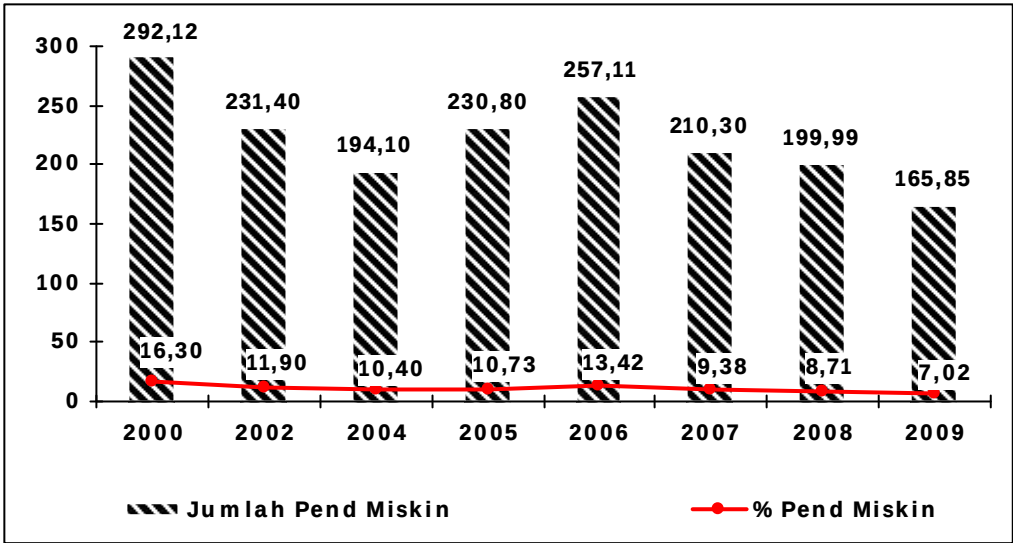


Sumber : BPS Prov. Kalteng, 2009

b. Angka Kemiskinan

Trend angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Secara rinci angka kemiskinan pada kurun waktu tersebut disajikan pada grafik 5.2 di bawah ini.

Grafik 5.2 ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2000 - 2009



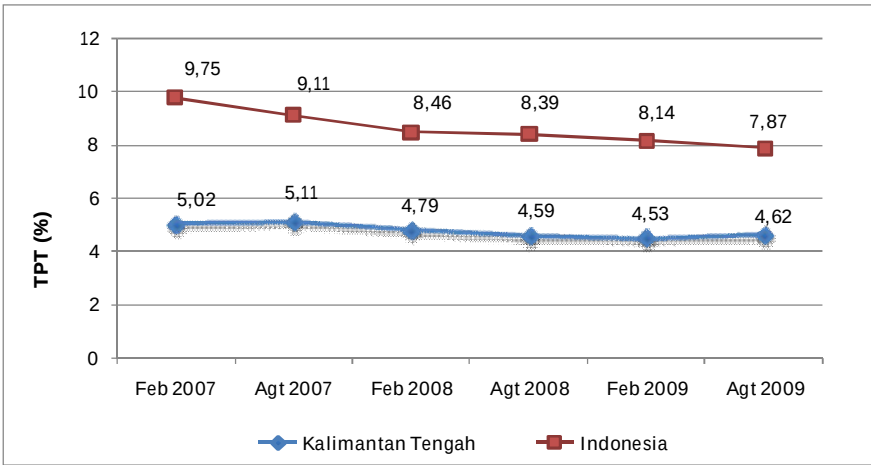
Sumber : BPS Prov. Kalteng, 2009

c. Angka Pengangguran

Sama halnya dengan kondisi kemiskinan, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan juga mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2007 angka pengangguran mencapai 5,11%, maka pada tahun

2009 turun menjadi 4,53%. Angka ini jauh berada di bawah angka pengangguran di tingkat nasional yang mencapai 8,14%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik 5.3 di bawah ini.

Grafik 5.3 **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KALTENG DAN NASIONAL, FEBRUARI 2007 – AGUSTUS 2009**



Sumber : BPS Prov. Kalteng, 2009

d. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) merupakan indikator komposit yang terdiri dari status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Angka IPM provinsi Kalimantan Tengah cenderung naik secara signifikan sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2004-2008**

Provinsi	2004		2005		2006		2007		2008	
	IPM	Ranking	IPM	Ranking	IPM	Ranking	IPM	Ranking	IPM	Ranking
Kalimantan Barat	65,4	27	66,20	28	67,08	28	67,53	29	68,17	29
Kalimantan Tengah	71,7	6	73,22	5	73,40	5	73,49	7	73,88	7
Kalimantan Selatan	66,7	24	67,44	26	67,75	26	68,01	26	68,72	26
Kalimantan Timur	72,2	4	72,94	6	73,26	6	73,77	5	74,52	5
Indonesia (BPS)	68,7		69,57		70,10		70,59		71,17	

Sumber : BPS Prov. Kalteng, 2009

5.2.2 RPJM ke-2 (2011 – 2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk **melanjutkan pembukaan keterisolasian dan mengembangkan kemandirian dan ketahanan perekonomian daerah untuk menghadapi era kesalingtergantungan dan ketidakpastian yang semakin tinggi di masa-masa yang akan datang.**

Pada tahap kedua ini, penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis potensi sumberdaya alam antar wilayah dan antar sektor harus semakin dikembangkan sehingga dinamika perekonomian semakin berkembang untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kualitas pelayanan dasar perlu semakin ditingkatkan sehingga masyarakat ditingkat wilayah benar-benar mendapatkan haknya yaitu pelayanan dasar yang memenuhi persyaratan sesuai standar pelayanan minimalnya masing-masing. Untuk itu, kerja sama tingkatan pemerintahan harus semakin ditingkatkan sehingga sumberdana yang terbatas dapat dioptimalkan sedemikian rupa.

Dalam 5 (lima) tahun kedua ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan

untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

5.2.3 RPJM ke-3 (2016 – 2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan **untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**

Dalam 5 (lima) tahun ketiga ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang

berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

5.2.4 RPJM ke-4 (2021 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk **mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.**

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang.

Dalam 5 (lima) tahun ketiga ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Arah Pembangunan Daerah yang dimuat dalam dokumen ini merupakan jabaran rinci dari Visi dan Misi yang menjadi prasyarat yang harus diwujudkan untuk benar-benar dapat mewujudkan visi Kalimantan Tengah.

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJP Daerah ke dalam RPJM Daerah. RPJP Daerah dimungkinkan untuk dilakukan perubahan apabila: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Perubahan RPJP Daerah tersebut harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL**, perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SUKOSRONO, SH.